

Studi eksplorasi tentang tata kelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS)

Dwita Darmawati*, Jaryono, & Wahyudin

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

*Email corresponding author: dwita_darma@yahoo.com

Abstrak

Penelitian eksplorasi ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat di wilayah Purwokerto. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan ahli zakat, empat pengelola ZIS dan 31 penyumbang zakat infak dan sedekah di wilayah Purwokerto. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui program-programnya organisasi pengelola zakat sudah melakukan usaha-usaha untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat melalui transparansi, laporan yang akuntabel, pengelolaan zakat infak dan sedekah dengan adil, dan bertanggung jawab. Hasil penelitian ini juga memperlihatkan beberapa faktor-faktor penting tata kelola zakat dalam persepsi penyumbang dan pelayanan yang diinginkan penyumbang ZIS. Beberapa implikasi diberikan dalam penelitian ini.

Kata kunci: Tata Kelola Zakat, Transparansi, Akuntabilitas, Keadilan, Responsibilitas.

Abstract

This exploration research aims to figure out the management of zakat in Purwokerto area. Data were collected through interviews with zakat experts, four ZIS managers and 31 donors of zakat infak and alms in Purwokerto area. The results of this study indicate that through its programs zakat management organizations have made efforts to gain public trust through transparency, accountable reports, management of zakat infak and alms with fair, and responsible. The results of this study also show some important factors of zakat management in the perceived contribution of donors and services that the donors of ZIS deserve. Several implications are given in this study.

Keywords: Zakat Management, Transparency, Accountability, Fairness, Responsibility.

PENDAHULUAN

Penelitian terkait potensi zakat di Indonesia sudah dilakukan beberapa pihak. Salah satunya adalah penelitian BAZNAS yang menunjukkan bahwa potensi zakat nasional pada tahun 2015 mencapai Rp 286 triliun (Outlook zakat 2017, Pusat kajian strategis BAZNAS). Namun demikian, potensi yang besar ini belum diikuti oleh penghimpunannya. Data menunjukkan penghimpunan zakat, infaq dan sedekah nasional (ZIS) oleh OPZ resmi pada tahun 2015 baru mencapai Rp 3,7 triliun atau kurang dari 1,3 persen potensinya. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain rendahnya kesadaran wajib zakat (muzakki), rendahnya kepercayaan terhadap BAZ dan LAZ, dan perilaku muzakki yang masih berorientasi jangka pendek, desentralis dan interpersonal. Sementara itu di lain pihak, pengelolaan zakat yang baik dapat menjadi sumber dana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hayati & Chaniago, 2011; Sembodo et al., 2014).

Penelitian Darmawati dan Nawarini (2017) menunjukkan bahwa masyarakat cenderung menyalurkan ZIS langsung pada penerima. Salah satu alasannya adalah ketidakpercayaan kepada organisasi pengelola zakat (OPZ). Ketidakpercayaan kepada OPZ ('amil) ini tentunya merupakan permasalahan karena OPZ, lembaga yang secara syariah ditugaskan untuk mengelola zakat (QS. At-Taubat (9): 60) pun oleh UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini merupakan tantangan bagi OPZ untuk mengelola ZIS secara professional agar mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa OPZ belum melakukan perencanaan strategis, program berjangka pendek (lihat Hayati, 2001; Darmawati, et al., 2009; Lestari et al, 2009). OPZ juga mengalami permasalahan sumber daya insane, antara lain pengelola yang berkomitmen rendah (Lestari et al., 2009), terjadi tingkat perputaran pengelola yang tinggi (Darmawati, 2009). Hal ini mengindikasikan bahwa OPZ belum berjalan dengan tata kelola organisasi yang baik Pada konteks perusahaan, tata kelola merupakan

sistem yang mengarahkan dan mengawasi korporasi bisnis. Struktur tata kelola mengatur distribusi hak dan tanggung jawab diantara partisipan yang berbeda dalam organisasi. Selain itu tata kelola juga memberi aturan dan prosedur untuk pengambilan keputusan (Clarke, 2008). Dengan adanya tata kelola organisasi yang baik, organisasi mempunyai struktur dan sarana untuk mencapai tujuan organisasi dan pemantauan kinerja, sehingga menjadikan organisasi menjadi lebih baik dan sehat. Dengan empat prinsip dalam tata kelola organisasi yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, keadilan dan tanggungjawab (Sefiana, 2009), diharapkan penerapannya akan meningkatkan reputasi organisasi dan membuatnya lebih menarik. Oleh karenanya, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengelolaan ZIS yang dilakukan oleh OPZ dan untuk menggali faktor-faktor tata kelola yang baik untuk OPZ.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah studi eksploratori. Untuk mendapatkan data tentang pengelolaan zakat sesuai syariah dan Undang-undang, dilakukan wawancara mendalam kepada ahli zakat. Selain itu data juga dikumpulkan dengan kuisioner yang dibagikan kepada penumbang ZIS Data yg terkumpul hasil wawancara diolah dengan menggunakan metode reduksi data, desplay data dan kategori data (Moleong, 2008). Uji mutu data dilakukan dengan triangulasi sumber, metode. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif ditekankan pada model analisis perbandingan dan intepretasi data. Data hasil dari kuisioner kemudian dianalisis dengan statistika deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Tata Kelola pada OPZ

Studi ini bertujuan untuk menggali informasi tentang pelaksanaan tata kelola yang baik pada OPZ dan merumuskan tata kelola yang baik untuk OPZ menurut persepsi pembayar ZIS. Informasi tentang pengelolaan zakat dikumpulkan dengan wawancara dengan pengelola zakat. Dalam penelitian ini sedianya akan diambil lima organisasi pengelola zakat (OPZ) resmi di wilayah Purwokerto yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas, Lazis MU, NU Care Lazis NU, Lazis Al Irsyad Al Islamiyyah dan IZI (Inisiatif Zakat Indonesia). Namun demikian, BAZNAS Kabupaten Banyumas belum bisa berpartisipasi dalam penelitian ini karena sedang mengalami transisi kepemimpinan. Wawancara dilakukan kepada pengelola zakat terkait dengan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran sebagai bagian dari tata kelola organisasi yang baik.

Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan memberikan informasi material terkait dengan organisasi kepada pemangku kepentingan. Transparansi meliputi keterbukaan dalam memberikan informasi yang tepat waktu, memadai, akurat, jelas dapat diperbandingkan, mudah diakses oleh publik. Dalam penelitian ini terungkap bahwa keempat OPZ telah melakukan transparansi terkait dengan informasi yang dibutuhkan. OPZ menyediakan informasi tentang keuangan dan pengelolaan zakat yang mudah setiap saat. Informasi yang disampaikan tentang visi, misi, tujuan, program dan susunan pengelola. Namun demikian, dalam wawancara dengan penyumbang ZIS sebagian penyumbang belum mengetahui adanya transparansi ini. Transparansi juga diberikan kepada penyumbang dengan memberikan akses langsung setiap saat kepada setiap penyumbang untuk melihat laporan keuangan secara daring.

Akuntabilitas

Akuntabilitas meliputi bagaimana OPZ mengatur tanggung jawab masing-masing bagian dalam organisasi. Transparansi ini dimulai dengan adanya kantor yang jelas ijin, tempat dan kegiatannya. Untuk tujuan ini, OPZ mempunyai aturan *standard of operation* (SOP) untuk setiap kegiatan pengelolaan zakat, mulai dari SOP menerima tamu sampai SOP bagaimana mencatat dana ZIS yang masuk, menggunakannya pada kegiatan yang diadakan OPZ dan membuat laporan keuangan. Guna menjamin bahwa kompetensi pengelola sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing, maka OPZ melakukan pelatihan-pelatihan. Pelatihan yang dilakukan antara lain *role play* untuk mempraktikkan SOP yang ada, seperti SOP dalam melayani penyumbang dan penerima dana ZIS, pelatihan tentang PSAK 109 sebagai pedoman dalam pelaporan keuangan pengelolaan dana ZIS.

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akan semua organ. Untuk mewujudkan akuntabilitas empat OPZ *Disclosures* (pengungkapan-pengungkapan) dalam bentuk publikasi pengelolaan sumber dan penggunaan dana yang bisa disebut pelaporan keuangan. Pelaporan ini disampaikan secara langsung kepada penyumbang secara periodik, melalui majalah yang diterbitkan, laporan keuangan, iklan program, atau melalui website yang mempunyai dan media sosial. Pengungkapan ini selain meliputi pengelolaan dana ZIS, juga berupa program-program yang dilaksanakan. Laporan keuangan

dan program yang dilaksanakan dilakukan dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat dan relevan bagi pemerintah dan masyarakat luas untuk mengevaluasi tanggungjawab sosial organisasi, menyediakan informasi mengenai pertukaran-pertukaran yang terjadi antar organisasi dan lingkungan sosial dan menyediakan informasi mengenai manfaat sosial (*social benefit*) dan biaya sosial (*social cost*) yang terjadi akibat operasi OPZ. OPZ juga menyediakan laporan arus kas yang telah dimodifikasi pada organisasi non profit.

Dalam hal pengawasan atas pengelolaan yang dilakukan OPZ, maka OPZ mempunyai dewan syariah yang bertugas untuk memastikan bahwa pengelolaan dana ZIS telah sesuai dengan aturan agama. Selain itu OPZ memisahkan antara pengurus dengan pengelola. Pengurus bertugas untuk membuat kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan ZIS, sedangkan pengelola bertugas untuk melaksanakannya. Dalam hal ini pengelola bertanggungjawab kepada pengurus. Untuk mengawasi pengelolaan keuangan, maka OPZ juga telah melakukan pelaporan secara periodik kepada penyumbang, Kementerian Agama, BAZNAS, lembaga lain seperti Muhammadiyah, NU, Yayasan Al Irsyad al Islamiyyah sebagai lembaga yang berhubungan dengan OPZ tersebut. OPZ juga telah diaudit oleh akuntan publik dan mendapat predikat wajar tanpa syarat (WTP). Dalam melaksanakan program-programnya, OPZ juga dipantau oleh Dinas sosial. Semua pelaporan dan pantauan ini bertujuan untuk menjaga akuntabilitas OPZ.

Keadilan (Kewajaran)

Keadilan/kewajaran perlu diwujudkan OPZ dalam memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan secara setara dan wajar. Dalam hal ini, setiap OPZ memastikan bahwa para penerima dana ZIS yang terdiri dari delapan golongan mendapatkan haknya secara adil yaitu sebesar seperdelapan bagian dari dana zakat. Namun demikian, untuk menyalurkan dana ZIS, masing-masing OPZ mempunyai ketentuan sendiri. Sebagai contoh, penyaluran dana infak untuk operasional (*amil*) paling banyak 20 persen pada LAZ Mu dan 15 persen pada LAZIS Al Irsyad Al Islamiyyah.

Responsibilitas

Responsibilitas meliputi tanggung jawab OPZ terhadap kelangsungan hidup organisasi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan menjamin bahwa pengelolaan ZIS yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan merupakan bagian dari responsibilitas OPZ. Hal ini diwujudkan dalam program-programnya. Pada empat OPZ yang diteliti, program-program dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bidang yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah, layanan sosial.

Program dalam bidang ekonomi meliputi program pelatihan keterampilan, incubator usaha umat, kampoeng kreatif, *community development* dan bantuan pemodal, gapoktan sejahtera dan pendampingan wirausaha. Program dalam bidang pendidikan seperti pemberian beasiswa kepada anak yatim, pelajar dan mahasiswa, bakti guru, rumah kreatif. Program dalam bidang kesehatan seperti rumah singgah pasien, layanan kesehatan keliling, layanan pendampingan pasien, pengobatan gratis, posyandu lansia, khitanan misal, donor darah, *ambulance* dhuafa. Adapun program dalam bidang dakwah seperti program dai seluruh negeri, wakaf tunai pembangunan masjid, santunan mubaligh, kado Ramadhan, desa gemilang, PG TPQ dan bina mualaf. Bidang layanan sosial diwujudkan dalam program layanan antar jenazah, benah rumah, dhuafa tersenyum, sedekah air, peduli bencana alam dan kemanusiaan, yatim gemilang.

Independensi

Independensi/kemandirian ditandai pada suatu keadaan di mana organisasi dikelola tanpa konflik kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak-pihak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip organisasi yang sehat. Berdasarkan wawancara dengan pengelola menunjukkan bahwa sejauh ini OPZ mempunyai kemandirian dalam melaksanakan program-programnya. Dalam melaksanakan tugasnya OPZ berpegang pada garis kebijakan yang telah dipunyai organisasi. Namun demikian, pengelola OPZ tetap berkoordinasi dengan pengurus dan juga organisasi/yayasan terkait dengan OPZ tersebut.

Persepsi Penyumbang tentang Pengelolaan yang Baik Bagi OPZ

Penelitian ini menggali pengelolaan zakat dalam persepsi penyumbang. Data dikumpulkan dengan kuisioner yang dibagikan kepada penyumbang. Kuisioner disebar kepada penyumbang dan kembali lengkap terisi sebanyak 31 kuisioner. Tabel tabel berikut memperlihatkan profil responden.

Tabel 1. Profil Responden Pembayar ZIS Berdasarkan Usia di Purwokerto 2017

Jenis Kelamin	Pria		Wanita		Total	
	Usia	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah
< 20 tahun	12	38,7	8	25,8	20	64,5
21-30 tahun	2	6,5	1	3,2	3	12,9
31-40 tahun	-	-	-	-	-	-
41-50 tahun	1	3,2	2	6,5	3	12,9
> 50 tahun	3	9,7	2	6,5	5	16,1
Total	18	58,1	13	41,9	31	100

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa responden paling banyak berusia di bawah 20 tahun mencapai 64,5 persen baru kemudian kelompok usia lebih dari 50 tahun.

Tabel 2. Profil Responden Pembayar ZIS Berdasarkan Pendidikan di Purwokerto 2017

Jenis Kelamin	Pria		Wanita		Total	
	Pendidikan	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah
SMA/ sederajat	13	41,9	8	25,8	21	67,7
Diploma	-	-	1	3,2	1	3,2
Strata 1	2	6,5	-	-	2	6,5
Strata 2	2	6,5	2	6,5	4	12,9
Strata 3	1	3,2	2	6,5	3	9,7
Total	18	58,1	13	41,9	31	100

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa responden penelitian ini paling banyak berasal dari kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan sebagai mahasiswa (67,7%) kemudian kelompok masyarakat berpendidikan strata dua (12,9%).

Tabel 3. Profil Responden Pembayar ZIS berdasarkan Pekerjaan di Purwokerto 2017

Jenis Kelamin	Pria		Wanita		Total	
	Pekerjaan	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah
Mahasiswa/ pelajar	13	41,9	8	25,8	21	67,7
PNS	3	9,7	5	16	8	25,8
Karyawan swasta	1	3,2	-	-	1	3,2
Wiraswasta	1	3,2	-	-	1	3,2
Total	23	41,8	32	56,36	55	100

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa responden penelitian ini paling banyak berasal dari kelompok masyarakat dengan profesi sebagai mahasiswa (67,7%) kemudian kelompok masyarakat berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (25,8%). Tabel 4 dan 5 memperlihatkan persepsi penyumbang terkait dengan tata kelola OPZ dan standar pelayanan berdasarkan analisis statistik diskriptif.

Tabel 4. Tata kelola OPZ dalam Persepsi Penyumbang ZIS di Wilayah Purwokerto 2017

Tata kelola OPZ dalam persepsi penyumbang	Persentase
Mempunyai laporan keuangan rutin dipublikasikan secara umum	80,6
Laporan keuangan dapat diakses publik setiap saat dengan mudah	80,6
Menyediakan informasi memadai, akurat (visi, misi, tujuan, program, strategi organisasi, susunan pengelola)	83,9
Menjamin kerahasiaan sesuai keinginan penyumbang.	87,1
Menjamin kejujuran dalam pelayanannya.	93,5
Menjamin keamanan dana ZIS.	93,5
Mempunyai kompetensi sumber daya insani sesuai tanggung jawabnya.	93,5
Mengelola dana ZIS dengan baik.	87,1
Mempunyai sistem penghargaan dan hukuman yang jelas bagi pengelola.	96,8
Mempunyai program yang peduli pada lingkungan.	87,1
Melaksanakan tanggung jawab sosial	74,2
Mengelola dana ZIS dengan hati-hati	93,5
Mempunyai independensi dalam mengelola dana ZIS	87,1
Memerhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan (penyumbang, pemerintah, masyarakat)	90,3
Memberi kesempatan kepada publik untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat.	58,1
Memberi kemudahan dalam membayar ZIS (Jemput ZIS, autodebet, transfer)	67,7
Memperhatikan seluruh pemangku kepentingan secara setara dan wajar.	100

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 4, dapat dilihat persepsi penyumbang tentang tata kelola bagi OPZ. Semua responden (100 persen) penyumbang ZIS menginginkan OPZ agar memerhatikan pemangku kepentingan seperti penyumbang dan penerima ZIS, pemerintah dan masyarakat, secara setara dan wajar. Penyumbang juga menginginkan para pengelola OPZ mempunyai kejujuran dan kompetensi yang baik sesuai dengan tanggung jawabnya. Selain itu jaminan keamanan dana ZIS yang dikelola, juga menjadi hal yang diperhatikan oleh responden penyumbang ZIS. Menurut responden, OPZ juga perlu mempunyai ukuran kinerja, sistem penghargaan dan hukuman yang jelas, kepatuhan pada UU dan aturan syariah. Selain itu, pengelolaan ZIS secara hati-hati dan jaminan independensi OPZ dari tekanan/pihak manapun juga menjadi keinginan responden terkait dengan tata kelola OPZ.

Terkait dengan pelayanan yang diinginkan penyumbang, tabel 5 berikut menunjukkan beberapa hal yang menjadi perhatian responden penyumbang ZIS. Penyumbang menginginkan pelayanan OPZ yang sesuai jadwal, penanganan keluhan dan pengaduan yang cepat dan tepat. OPZ diharapkan mampu memberikan bantuan bagi pihak yang memerlukannya, sopan dan ramah dalam pelayanan dan kemudahan berkomunikasi. Selain itu, penyumbang juga menginginkan pengelolaan ZIS yang profesional.

Tabel 5. Pelayanan yang diinginkan responden penyumbang ZIS di Purwokerto tahun 2107

Pelayanan	Persentasi
Mempunyai pelayanan yang sesuai dengan jadwal	90,3
Mampu menangani keluhan dan pengaduan.	90,3
Cepat menanggapi keluhan dan pengaduan.	64,5
Mampu dalam menangani pihak yang memerlukan bantuan.	87,1
Profesional dalam pelayanan kepada penyumbang dan penerima ZIS	87,1
Ramah dalam pelayanan kepada penyumbang dan penerima ZIS	87,1
Sopan dalam pelayanan kepada penyumbang dan penerima ZIS	90,3
Kemudahan berkomunikasi antara petugas dan penyumbang, penerima ZIS	93,5

Sumber: data diolah

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat telah melakukan pengelolaan ZIS melalui program-program secara transparan, akuntabel, adil dan bertanggung jawab. Beberapa faktor penting dalam pengelolaan zakat dalam persepsi penyumbang adalah penyampaian informasi terkait OPZ, pengelola dan program, laporan keuangan yang dapat diakses publik setiap saat; jaminan kerahasiaan penyumbang, keamanan dana, kejujuran dan kehati-hatian pengelolaan, kompetensi pengelola, ukuran kinerja, system penghargaan dan hukuman bagi pengelola, program yang peduli lingkungan dan bertanggung jawab sosial. OPZ diharapkan menjamin independensi, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberukan masukan, pendapat dan memerhatikan semua pemangku kepentingan.

Adapun dalam pelayanan yang diinginkan penyumbang adalah jam pelayanan yang sesuai jadwal, kemampuan dalam menangani keluhan dan pengaduan, professional, ramah, sopan, mudah berkomunikasi dengan pengelola.

DAFTAR PUSTAKA

- Clarke, Thomas. 2008. *Theories of corporate governance, the philosophical foundations of corporate governance*. New York: Routledge.
- Darmawati, D. Mukti dan Wahyudin, M.A. 2009. *Pengembangan model manajemen strategis pada lembaga amil zakat (Studi kasus pada Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Banyumas)*. Purwokerto: Hibah Bersaing DIKTI, Lembaga Penelitian Unsoed.
- Darmawati, D., Lestari, P.U., dan Widyastuti, U. 2007. Implementasi perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, proses bisnis internal dan pelanggan dalam perencanaan strategis (Studi kasus pada Badan Amil Zakat dan Infak/Sedekah Kabupaten Banyumas) *Jurnal Performance*.
- Darmawati, D., Mukti, M. A., dan Wahyudin. 2010. Kinerja Lembaga Amil zakat dalam pendekatan balanced scorecard (Studi kasus di kabupaten Banyumas). *Majalah Ilmiah Ilmu Pengetahuan Sosial*. Universitas Sebelas Maret. Vol. 11 No. 2 September 2010.
- Darmawati, D., Lestari, P., Mukti, M. A., dan Wahyudin. 2009. Pengembangan Badan Amil Zakat Daerah se-Eks Karesidenan Banyumas.
- Darmawati, D. dan Nawarini, T. A. 2016. Potensi, pencapaian pengumpulan zakat, dan permasalahannya di Kabupaten Banyumas dan Purbalingga. *Al Tijari* 1 (2): 141-150.

- Hayati, K dan Chaniago, I. 2011. Zakat potential as means to overcome poverty (A study in Lampung). *Journal of Indonesian Economy & Business* 26 (2).
- Keputusan Menteri Agama RI No. 118 Tahun 2014 tentang pembentukan BAZNAS Provinsi sebagai Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Lestari, P., Darmawati, D., Mukti, M. A., Wahyudin. 2009. *Pengembangan Badan Amil Zakat dengan pendekatan balanced scorecard (Studi kasus pada Badan Amil Zakat s-eks Karesidenan Banyumas)*. Purwokerto: Hibah Stranas DIKTI. Lembaga Penelitian Unsoed.
- Lestari, P., Pratiwi, U., dan Ulfah, P. 2015. Identifikasi faktor organisasional dalam pengembangan 'E Governance' pada organisasi pengelola zakat. *Mimbar* 31 (1): 221-228.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Outlook Zakat Indonesia 2017*. Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
- Sefiana, Eka. 2009. Pengaruh penerapan corporate governance terhadap manajemen laba pada perusahaan perbakan yang telah go public pada BEI.
- Sembodo, H., Pujiyanto H., dan Windani, K., 2014. *Pengelolaan dan pendistribusian zakat di Indonesia: kajian potensi, pendayagunaan dan multiplier effect dalam pemberdayaan masyarakat miskin (Studi kasus pada BAZDA dan LAZ di eks Karesidenan Banyumas)*. Purwokerto: LPPM Universitas Jenderal Soedriman.
- UURI No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat.